

ANALISIS KAPASITAS DAN SINERGI APARAT KEWILAYAHAN DALAM DETEKSI DINI AKSI TERORISME

Yudi Rusfiana¹ dan Abu Hanifah²

Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Bagian Operasional Balaklitpers Pusintelad

Email: rusfianayoudhy@gmail.com, abuhanifah0230@gmail.com

ABSTRAK. Pada hakekatnya “kapasitas” akan meningkatkan kemampuan manakala tersinergikan dengan kemampuan yang lainnya seperti halnya dalam mengembangkan kapasitas aparat kewilayahan yang memiliki fungsi intelejen baik di lingkungan TNI, Polri maupun pemerintah daerah. Dalam dua dasawarsa terakhir aksi terorisme yang terjadi di Indonesia juga merupakan rangkaian dari aksi terorisme global walaupun dari beberapa aspek seperti halnya ideologi, politik dan ekonomi dalam negeri mewarnai dan turut memicu aksi terorisme. Ancaman aksi terorisme di Indonesia sangat mengganggu kondusifitas keamanan nasional. Wilayah Ibukota seperti halnya DKI Jakarta merupakan wilayah strategis merupakan pusat Pemerintahan, pusat Perekonomian dan Industri, pusat Hiburan dan banyak Objek Vital. DKI Jakarta menjadi *center of gravity* Indonesia. Oleh karena itu wilayah akan menjadi sasaran teroris. Mengantisipasi kondisi dimaksud, TNI memiliki kemampuan intelijen dan kemampuan teritorial sebagaimana tertuang dalam pasal 7 ayat (2) UU Nomor 34 Tahun 2004 serta memiliki rantai komando (*chain of command*) sampai tingkat desa melalui Babinsa (Bintara Pembina Desa). Demikian halnya dengan Polri menjadi tumpuan dalam penegakan hukum pemberantasan terorisme serta melakukan tindakan pre-emptif, preventif dan represif terhadap ancaman terorisme. Sehingga Baik Pemerintah, TNI maupun Polri, tidak dapat menjalankan tugas secara parsial diperluka sinergi antara Pemda, TNI dengan Polri terutama pada deteksi dini aksi terorisme yang diyakini mampu untuk mengeliminir perkembangan terorisme di Indonesia.

Kata Kunci: Kapasitas, Sinergi, deteksi dini

ANALYSIS CAPACITY AND SYNERGY OF REGIONAL AUTHORITIES IN EARLY DETECTION OF TERRORISM ACTIONS

ABSTRACT. *ABSTRACT. In essence, "capacity" will increase capabilities when synergized with other capabilities, such as in developing the capacity of regional officers who have intelligence functions both within the TNI, Police and local governments. In the last two decades, acts of terrorism that occurred in Indonesia are also a series of acts of global terrorism, although from several aspects such as ideology, politics and the domestic economy, they have colored and contributed to the triggering of acts of terrorism. The threat of acts of terrorism in Indonesia greatly disturbs the conduciveness of national security. The Capital Region, like DKI Jakarta, is a strategic area which is the center of government, the center of the economy and industry, the center of entertainment and many vital objects. DKI Jakarta is the center of Indonesian graffiti. Therefore the area will become a terrorist target.*

Anticipating this condition, the TNI has intelligence capabilities and territorial capabilities as stated in Article 7 paragraph (2) of Law Number 34 of 2004 and has a chain of command to the village level through Babinsa (Village Pembina Bintara). Likewise, the National Police is the focus of law enforcement to eradicate terrorism and take pre-emptive, preventive and repressive actions against the threat of terrorism. So that both the Government, TNI and Polri, cannot carry out their duties partially, synergy between the Regional Government, TNI and Polri is needed, especially in early detection of acts of terrorism which are believed to be able to eliminate the development of terrorism in Indonesia.

Keywords: Capacity, Synergy, early detection

PENDAHULUAN

Kapasitas hakikatnya kemampuan yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok dalam melakukan sesuatu sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kapasitas akan lebih kuat dan

mampu manakala tersinergikan dengan kemampuan yang lainnya seperti halnya dalam mengembangkan kapasitas aparat kewilayahan (pemerintah daerah, unsur TNI dan Polri) yang memiliki fungsi intelejen baik di lingkungan TNI, Polri maupun pemerintah daerah.

¹ Staf Pengajar Pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Dosen Non Organik pada Seskoad; Seskoau

² Perwira Menengah pada Pusintelad

Sebagaimana dipahami bahwa terorisme global menjadi aktual sejak peristiwa World Trade Centre (WTC) di New York, Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001. Peristiwa WTC menjadi isu global yang mempengaruhi kebijakan politik seluruh negara-negara di dunia, sehingga menjadi titik tolak opini perang lawan terorisme. Rangkaian aksi seperti yang terjadi di Manchester Inggris, Mesir, Marawi Filipina merupakan serangkaian aksi teror serius. ISIS menjadi kelompok radikal yang paling disorot dalam aksi-aksi teror dimaksud, hal ini tentunya tidak lepas dari pengakuan mereka sendiri yang menyatakan terlibat.

Aksi terorisme yang terjadi di Indonesia juga merupakan rangkaian dari aksi terorisme global walaupun dari beberapa aspek seperti halnya ideologi, politik dan ekonomi dalam negeri mewarnai dan turut memicu aksi terorisme. Ancaman aksi terorisme di Indonesia sangat mengganggu kondusifitas keamanan nasional. Aksi teroris melalui pengeboman terhadap gereja dan café-café di Indonesia sejak tahun 2000-an merupakan aksi teror yang mengatasnamakan jihad agama. Wilayah seperti DKI, Depok, Tangerang dan Bekasi merupakan wilayah yang memiliki nilai strategis, pusat perekonomian dan industri, pusat pemerintahan, pusat hiburan dan terdapat objek vital nasional didalamnya. Artimya wilayah dimaksud adalah *center of gravity* Indonesia. Wilayah dimaksud dalam perspektif intelejen dapat menjadi sasaran teroris untuk bersembunyi, penyelaman serta menjalankan aksinya, sekaligus mencari/ merekrut kader baru. Jakarta sebagai tempat aksi teror karena akan berpengaruh pada ipoleksosbud Indonesia. Bekasi, Tangerang dan Depok dijadikan tempat bersembunyi, penyelaman, persiapan dan mencari kader.

Badan-badan intelijen seperti BIN, BAIS dan badan intelijen bentukan lainnya serta badan intelijen kewilayah telah berupaya melaksanakan kegiatan preventif dan represif untuk menghilangkan terorisme di Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut aparat kewilayahan

seperti halnya Pemda, Polri dan unsur TNI memiliki tanggungjawab untuk meningkatkan kemampuan dan bersinergi satu sama lain dalam memikul beban untuk berperan nyata dalam penanganan terorisme di wilayah dengan melaksanakan deteksi dan peringatan dini terhadap perkembangan situasi yang terjadi di wilayah tanggung jawabnya khususnya terorisme.

Pemahaman tentang pengembangan kapasitas secara terminologi masih ada perbedaan pendapat, sebagian orang merujuk kepada pengertian dalam konteks kemampuan (pengetahuan, keterampilan) sebagian lagi mengartikan kapasitas dalam konteks yang lebih luas termasuk di dalamnya soal sikap dan perilaku. Sebagian ilmuwan juga melihat pengembangan kapasitas sebagai *capacity development* atau *capacity strengthening*, mengisyaratkan suatu prakarsa pada pengembangan kemampuan yang sudah ada (*existing capacity*). Sementara yang lain lebih merujuk pada *constructing capacity* sebagai proses kreatif membangun kapasitas yang belum nampak (*not yet exist*)³

Pengembangan kapasitas pada umumnya diartikan sebagai peningkatan kemampuan atau kompetensi individu, kelompok dan organisasi yang mencakup banyak komponen, sehingga didalam pengembangan kapasitas terdapat beberapa dimensi dan fokus. Dimensi dan fokus tersebut merupakan bagian proses dinamis yang berkelanjutan. Adapun dimensi dan fokus pengembangan kapasitas menurut ada tiga tingkatan, yaitu: Tingkatan Individual, seperti potensi-potensi individu, keterampilan individu, pengelompokan pekerjaan dan motivasi-motivasi dari pekerjaan individu dalam organisasi; Tingkatan Organisasi, seperti struktur organisasi, prosedur dan mekanisme pekerjaan, proses pengambilan keputusan didalam organisasi, pengaturan sarana dan prasarana, hubungan dan jaringan organisasi dan; Tingkatan Sistem, seperti kerangka kerja yang berhubungan dengan peraturan, kebijakan

³ H. R. Riyadi Soeprapto dalam artikel "Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah Menuju Good Governance" disampaikan pada Workshop Reformasi Birokrasi pada tanggal 30 Juni 2006 di Kendari

pada (PDF) [The Capacity Building For Local Government Toward Good Governance](#) | Putri Diana Winata - Academia.edu

dan kondisi dasar yang mendukung pencapaian obyektivitas kebijakan tertentu⁴.

Intelejen merupakan kegiatan yang berkaitan dengan hal rahasia (telik sandi). Intelijen berkaitan dengan proses penginderaan awal atau lebih dikenal dengan early warning system (sistem peringatan dini). Kegiatan intelijen merupakan bagian integral sistem peringatan dini yang memungkinkan pembuat kebijakan memiliki fore knowledge (kewaspadaan dini). Tugas umum intelijen adalah mengumpulkan, menganalisa dan memberikan informasi yang diperlukan kepada pembuat kebijakan dalam mengambil keputusan terbaik untuk mencapai tujuan

Menurut Encarta World Dictionary menyebutkan tiga pengertian intelijen, yaitu :

- 1) Informasi mengenai rencana atau tindakan rahasia terutama yang berkenaan dengan pemerintah atau militer asing, bisnis lawan atau pelaku kejahatan.
- 2) Kegiatan mengumpulkan informasi rahasia tersebut dan mempergunakannya.
- 3) Organisasi yang mengumpulkan informasi rahasia mengenai rencana atau tindakan yang dilakukan oleh pihak musuh atau calon musuh⁵

Pemahaman intelijen memiliki makna yang lebih luas yaitu : 1) Intelijen sebagai pengetahuan atau produk adalah keterangan yang sudah diolah tentang sesuatu yang berkaitan dengan ancaman dan peluang serta merupakan hasil akhir dari proses pengolahan roda perputaran Intelijen yang bermakna untuk disampaikan kepada pejabat atau satuan yang memerlukan, sebagai bahan penyusunan rencana, perumusan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan; 2) Intelijen sebagai badan/organisasi. Merupakan Satuan/badan/organisasi Intelijen yang disusun, dilengkapi dan dibekali secara khusus untuk melaksanakan pembinaan dan atau penggunaan

Intelijen dalam rangka mendukung tugas pokok; 3) Intelijen sebagai kegiatan. Merupakan segala usaha, pekerjaan, kegiatan dan tindakan dibidang Intelijen untuk merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan atau operasi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan dalam rangka pelaksanaan fungsi Intelijen.⁶

Deteksi dini merupakan sebuah rangkaian upaya dan/ atau kegiatan mencari dan menemukan hal-hal, kejadian-kejadian atau situasi tertentu yang dapat atau mungkin merupakan gejala atau awal terjadinya ancaman atau gangguan sehingga petugas pengamanan dapat mempersiapkan dan mengerahkan kekuatan dan kemampuan untuk tindakan antisipasi untuk ancaman/gangguan tersebut tidak terjadi serta penanganan atau penindakan apabila ancaman/gangguan benar benar terjadi.⁷

Sinergi itu sendiri adalah Kombinasi atau paduan unsur atau bagian yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar daripada dikerjakan sendiri-sendiri, selain itu gabungan beberapa unsur akan menghasilkan suatu produk yang lebih unggul. Adapun sinergitas sendiri merupakan proses memadukan beberapa aktivitas dalam rangka mencapai satu hasil yang berlipat ganda. Dilihat dari sudut organisasi, sinergi berarti bahwa dengan bekerjasama dan saling berhubungan, bagian-bagian yang saling terpisah di dalam suatu organisasi akan menjadi lebih produktif dibandingkan kalau mereka bertindak sendiri-sendiri⁸

Sementara kata “teroris” dan terorisme berasal dari kata latin “terrere” yang kurang lebih berarti membuat gemetar atau menggetarkan. Kata teror juga bisa menimbulkan kengerian akan tetapi sampai dengan saat ini belum ada definisi terorisme yang bisa diterima secara universal. Pada dasarnya istilah terorisme merupakan sebuah konsep yang memiliki konotasi yang sensitif

⁴ Ibid1

⁵ Y Wahyu Suranto, Jasir Karwita, Victor Hasibuan, *Intelijen teori, aplikasi, dan modernisasi*, Ed.6, Multindo Mega Pratama, Jakarta. 2008

⁶ Naskah Sekolah Sementara Pengenalan Intelijen, Kep Danpusintelad No Kep/5/I/2015 Tgl 28 Januari 2015

⁷ D Suryadi. “Kedudukan Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten/Kota Berdasarkan Peraturan Menteri dalam

Negeri Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Komunitas Intelijen Daerah Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara. 2016.

⁸ Covey, Steven R, 2010, *The 7 Habits of Highly Effective People* (7 Kebiasaan manusia yang sangat efektif)

karena terorisme mengakibatkan timbulnya korban warga sipil yang tidak berdosa. Terorisme secara kasar merupakan suatu istilah yang digunakan untuk penggunaan kekerasan terhadap penduduk sipil/non kombatan untuk mencapai tujuan politik, dalam skala lebih kecil daripada perang. Dari segi bahasa, istilah teroris berasal dari Perancis pada abad 18. Kata Terorisme yang artinya dalam keadaan teror (under the terror), berasal dari bahasa latin "terrere" yang berarti gemetaran dan "deterre" yang berarti takut.⁹

Menurut A.P Schimd, teror pada awalnya adalah sebuah keadaan pikiran atas ketakutan yang sangat besar atas bahaya yang sangat menakutkan pada level individu dan atas ketakutan yang melingkup pada level kolektif. Di sisi lain, terorisme adalah sebuah aktivitas, metode atau taktik yang merupakan hasil dari persaan psikologis bertujuan menghasilkan 'teror'. (Terror' is, first of all, a state of mind characterized by intense fear of a threatening danger on an individual level and by a climate of fear on the collective level. 'Terrorism', on the other hand, is an activity, method or tactic which, as a psychological outcome, aims to produce 'terror')¹⁰.

Terorisme merupakan salah satu perwujudan dari konflik yang dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk agresi. Meminjam Teori Frustrasi-Agresi oleh Dollard dan Miller, agresi diakibatkan dari frustrasi. Frustrasi terjadi karena adanya hambatan dalam meraih suatu tujuan. Jadi aksi terorisme merupakan salah satu wujud dari pelampiasan frustrasi. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah kebutuhan primordial yaitu kebutuhan-kebutuhan primordial-universal.¹¹

Berdasarkan fenomena terkait dengan pengembangan kapasitas dan sinergi aparat kewilayahan dalam deteksi dini terorisme yang tentunya belum optimal, dapat dirumuskan masalah Bagaimana pengembangan kapasitas dan sinergi aparat kewilayahan dalam deteksi dini terorisme.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dalam menganalisis pengembangan kapasitas dan sinergi aparat kewilayahan dalam deteksi dini terorisme khususnya yang terjadi di wilayah Jakarta, diharapkan dengan metode dan pendekatan ini dapat terdeskripsikan kapasitas dan sinergi aparat kewilayahan (unsur TNI, Polri dan Pemda) dalam melaksanakan deteksi dini aksi terorisme

Informan yang dipilih menggunakan teknik *purposive* yaitu cara memilih informan yang mewakili dalam proses pengumpulan data yang objektif. Teknik pengambilan sampel *purposive* sendiri adalah teknik pengambilan sampel yang dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. unsur pemda dalam hal ini Kesbangpolinmas; Unsur aparat kewilayahan TNI/Polri dan Tokoh Masyarakat

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wilayah Ibukota seperti halnya DKI Jakarta merupakan wilayah strategis merupakan pusat Pemerintahan, pusat Perekonomian dan Industri, pusat Hiburan dan banyak Objek Vital. DKI Jakarta menjadi *center of gravity* Indonesia. Oleh karena itu wilayah tersebut menjadi sasaran teroris untuk bersembunyi, penyelaman serta menjalankan aksinya, sekaligus mencari/ merekrut kader baru. Jakarta dijadikan sebagai tempat aksi teror karena akibat aksi teror tersebut akan berpengaruh pada Ipoeksosbud Indonesia. Wilayah Bekasi, Tangerang dan Depok dijadikan tempat bersembunyi, penyelaman, persiapan dan mencari kader baru. Teror di wilayah Jadetabek diawali dari tahun 2000, dimana Kedubes Filipina menjadi sasarannya dan sampai saat ini tercatat sebanyak 16 kali aksi terorisme di wilayah Jadetabek hingga tahun 2017, dan aksi-aksi tersebut mendapat perhatian serius dari Pemerintah Indonesia.

⁹ Bambang Abimanyu. *Teror Bom di Indonesia*, Jakarta :Grafindo.2005

¹⁰ Jajang Jahroni dan Jamhari Makruf. *Memahami Terorisme, Sejarah, Konsep dan Model*, Jakarta:Kencana Prenadamedia Grup.2016.

¹¹ *Penanggulangan Terorisme Berdasarkan Konsep Problem-Solving Approach (Kajian Pada Respons Pemerintah Terhadap Gerakan Jamaah Ansharut Tauhid)*, Jurnal Prodi Damai dan Resolusi Konflik, Juni 2017, Volume 3 Nomor 2

Tabel 1. Aksi terorisme di Jadetabek Tahun 2000-2017

No	Waktu	Peristiwa
1.	1 Agustus 2000	Bom Kedubes Filipina, Bom meledak dari sebuah mobil yang diparkir di depan rumah Duta Besar Filipina, Menteng, Jakarta Pusat.
2.	27 Agustus 2000	Bom Kedubes Malaysia, Granat meledak di kompleks Kedutaan Besar Malaysia di Kuningan, Jakarta.
3.	13 September 2000	Bom Bursa Efek Jakarta, Ledakan mengguncang lantai parkir P2 Gedung Bursa Efek Jakarta.
4.	22 Juli 2001	Bom Gereja Santa Anna dan HKBP, di Kawasan Kalimalang, Jakarta Timur.
5.	23 September 2001	Bom Plaza Atrium Senen Jakarta, Bom meledak di kawasan Plaza Atrium, Senen, Jakarta.
6.	6 November 2001	Bom sekolah Australia, Jakarta. Bom rakitan meledak di halaman Australian International School (AIS), Pejaten, Jakarta.
7.	1 Januari 2002	Bom Tahun Baru, Granat manggis meledak di depan rumah makan ayam Bulungan, Jakarta.
8.	3 Februari 2003	Bom Kompleks Mabes Polri, Bom rakitan meledak di lobi Wisma Bhayangkari, Jakarta.
9.	27 April 2003	Bom Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, Bom meledak di area publik di terminal 2F, bandar udara internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Jakarta.
10.	5 Agustus 2003	Bom JW Marriott, Bom menghancurkan sebagian Hotel JW Marriott.
11.	9 September 2004	Bom Kedubes Australia, Ledakan besar terjadi di depan Kedutaan Besar Australia.
12.	17 Juli 2009	Bom Jakarta, Dua ledakan dahsyat terjadi di Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton, Jakarta. Ledakan terjadi hampir bersamaan.
13.	22 April 2011	Bom Gading Serpong, Rencana bom yang menargetkan Gereja Christ Cathedral Serpong, Tangerang Selatan, Banten dan diletakkan di jalur pipa gas.
14.	14 Januari 2016	Bom dan baku tembak Jakarta, Ledakan dan baku tembak di sekitar Plaza Sarinah, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.
15.	24 Mei 2017	Bom Terminal Bus Kampung Melayu Jaktim, Ledakan bom bunuh diri sebanyak dua kali dengan dua orang pelaku dan menewaskan tiga orang anggota kepolisian yang sedang menjaga pawai obor.
16	30 Juni 2017	Penusukan terhadap anggota Brimob, di Masjid Falatehan yang ada di dekat Lapangan Bhayangkara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Sumber : Kodam Jaya, 2018.

Dari data di atas, menunjukan bahwa wilayah Jadetabek berpotensi akan terus dijadikan sasaran aksi terorisme.

Pengembangan Kapasitas dan Sinergi Aparat Kewilayahan dalam Deteksi Dini Aksi Terorisme

Kapasitas merupakan sebuah gambaran yang secara substansif menggambarkan kualitas dan kemampuan dalam penyelenggaraan tugas aparat kewilayahan yang terdiri dari pemerintah daerah, unsur TNI dan Polri dalam konteks ini dalam melaksanakan deteksi dini aksi terorisme.

Di wilayah Jakarta termasuk Jabodetabek terdapat aparat kewilayahan yang bekerja secara sinergis dalam melaksanakan deteksi dini aksi terorisme sinergi antara Pemerintah daerah, TNI dan Polri sebagai aparat kewilayahan merupakan suatu keniscayaan dalam rangka peringatan dini, deteksi dini, pencegahan dan menangkal perkembangan terorisme di Indonesia.

Peranan Intelijen sebagai mata dan telinga bagi organisasi dan pimpinan semakin dibutuhkan dari waktu ke waktu terutama dalam memberikan informasi yang cepat, tepat dan akurat sebagai bahan untuk mengambil keputusan dalam menentukan kebijaksanaan terhadap berbagai masalah yang dihadapi. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat serta perkembangan situasi dari berbagai aspek kehidupan masyarakat yang semakin kompleks, mengakibatkan tertinggalnya Intelijen Keamanan dalam mendeteksi dan mengantisipasi berbagai permasalahan keamanan yang timbul, sehingga untuk mengantisipasi kondisi tersebut dituntut pengembangan sistem yang menyangkut Intelijen Teknik, khususnya bidang deteksi Intelijen, komunikasi Intelijen dan pengamanan Intelijen didukung oleh sumber daya manusia yang memadai¹².

Mencermati perkembangan aksi teror di Indonesia, pengembangan kapasitas aparat kewilayahan yang terkait dengan fungsi intelijen pada kenyataannya memiliki kemampuan sangat terbatas dalam melihat, mengamati, menggambarkan, merekam suatu data, fakta dan informasi. Karena itu untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas fungsi intelijen, dalam rangka upaya deteksi dan cegah dini (*early warning system*) dibutuhkan

pengembangan alat bantu penginderaan yang baik dan efektif. Walaupun baik pemerintah daerah, TNI dan Polri memiliki perangkat masing-masing dalam melaksanakan fungsi dimaksud.

TNI memiliki kemampuan intelijen dan kemampuan teritorial sebagaimana tertuang dalam pasal 7 ayat(2) UU Nomor 34 Tahun 2004 serta memiliki rantai komando (*chain of command*) sampai tingkat desa melalui Babinsa (Bintara Pembina Desa). Demikian halnya dengan Polri yang selama ini menjadi tumpuan dalam penegakan hukum pemberantasan terorisme serta melakukan tindakan pre-emptif, preventif dan represif terhadap ancaman terorisme. Baik Pemerintah, TNI maupun Polri, tidak dapat menjalankan tugas secara institusional tunggal. Dengan sinergi antara Pemda, TNI dengan Polri dalam deteksi dini aksi terorisme diyakini mampu mengeliminir perkembangan terorisme di Indonesia.

Sinergi merupakan kebersamaan dalam berpikir dan bertindak untuk mencapai tujuan bersama dengan hasil yang diperoleh merupakan hasil bersama, dan lebih efektif, efisien serta optimal dibandingkan melaksanakan secara parsial atau sendiri-sendiri. Kenyataan ini dapat dilihat dari adanya kegiatan sarasehan peningkatan kewaspadaan deteksi dini bagi pemuda, pelajar dan santri terhadap potensi terorisme yang dilakukan oleh Pemerintah daerah dalam hal ini Kesbangpol secara rutin yang diharapkan dengan kegiatan ini generasi muda agar tidak terpengaruh dengan paham Raka, Raki, Rala tetap berpegang teguh pada 4 Pilar kebangsaan (Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia).

Pemerintah termasuk pemerintah daerah melakukan sinergi deteksi dini melalui berbagai cara, sebut saja melalui pendekatan melalui tokoh masyarakat, tokoh agama moderat dan yang cenderung radikal guna mengubah pemikiran radikal menjadi moderat, yakni dengan memberikan pengertian

¹² Disarikan dari Surat Keputusan Kapolri Nomor: Skep / 991 / XII / 2005 tanggal 30 Desember 2005, tentang Sistem Pembinaan Alat Khusus Intelijen

sesungguhnya tentang istilah jihad yang selama ini salah. Sementara itu, penegakan hukum dalam memerangi terorisme dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tanpa pandang bulu, serta tidak mengarah pada penciptaan citra negatif kepada kelompok masyarakat tertentu. Perang melawan terorisme didasari upaya untuk menegakkan ketertiban umum dan melindungi masyarakat bukan atas tekanan dan pengaruh negara asing ataupun kelompok tertentu dan dilakukan melalui koordinasi antarinstansi terkait dan komunitas intelijen serta partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat.

Diselenggarakannya gelar budaya dan ceramah-ceramah mengenai wawasan kebangsaan dan penyebaran buku-buku terorisme dapat mengubah persepsi negatif masyarakat terhadap langkah Pemerintah untuk memerangi terorisme di Indonesia. Peningkatan kemampuan berbagai satuan anti teror dan intelijen dalam menggunakan sumber-sumber primer dan jaringan informasi diperlukan agar dapat membentuk aparat anti teror yang profesional dan terpadu dari TNI, Polri, dan BIN. Selanjutnya, kerja sama internasional sangat perlu untuk ditingkatkan karena terorisme merupakan permasalahan lintas batas yang memiliki jaringan dan jalur tidak hanya di Indonesia.

Pentingnya kerjasama yang baik dan erat antar instansi tersebut akan berpengaruh terhadap penanganan deteksi dini terorisme. Jaringan terorisme tersebar demikian luas baik di dalam maupun luar negeri, maka dari itu tindakan penanganan dan pencegahan aksi terorisme tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. Pencegahan hanya bisa dilakukan apabila intelijen berfungsi maksimal, tidak hanya di pusat tetapi juga sampai tingkat terbawah agar ada gunanya, karena terorisme sudah merebak.³⁹ Kerjasama antar instansi terkait penanganan aksi terorisme sudah berjalan, namun perlu ada peningkatan agar penanganan/pencegahan terorisme melalui : Penyusunan sistem dan

Mekanisme Kerja Intelijen; menciptakan suatu lapangan kekuasaan teknis fungsi intelijen secara konkrit pada setiap strata satuan dan staf intelijen mulai dari tingkat Mabes sampai kepada intelijen instansi lain, sehingga dapat memperlancar proses penyelidikan lebih lanjut.

Pertukaran Informasi antar instansi intelijen hal yang positif dapat dilaksanakan untuk memperlancar kegiatan pengumpulan informasi dan keterangan yang diperlukan dalam rangka proses penyelidikan yang dilakukan. Dalam pertukaran informasi ini baik Deninteldam, unsur Polri, BAIS TNI, BIN, Satuan Anti Teror maupun aparat Bea dan Cukai merupakan perwujudan rasa kebersamaan untuk saling berbagi informasi dan itu penting untuk dilaksanakan. Selanjutnya untuk mewujudkan kapasitas dan sinergi aparat kewilayahan khususnya di daerah (Pemda, Unsur TNI, Polri) dalam mengantisipasi ancaman melalui deteksi dan peringatan dini menjadi ranah intelijen yang harus diperankan oleh Kominda. Kominda bisa melakukan deteksi dini agar mengetahui segala apa yang ada dan apa yang terjadi di setiap jengkal wilayah yang menjadi tanggung jawabnya berikut segala perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat serta perkembangannya.

Selanjutnya mengidentifikasi tantangan yang tengah dan akan dihadapi, kemudian memberikan peringatan dini sebagai pengetahuan dasar dan arah bagi perumusan kebijaksanaan yang bersifat antisipatif atau pengambilan keputusan dan tindakan dengan resiko yang telah diperhitungkan. Dalam rangka penyelenggaraan deteksi dini dan peringatan dini di daerah tersebut perlu didukung dengan koordinasi yang baik antar aparat unsur intelijen secara profesional sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 2006

³⁹ Jenderal TNI Endriartono Sutarto. *Badan Intelijen Harus dikontrol*, Harian Umum Kompas, Nomor 335 Tahun ke-40, Tanggal 11 Juni, Jakarta, 2005.,

tentang Komunitas Intelijen Daerah (Kominda)¹³. Kegiatan koordinasi dan sinergitas yang dilakukan oleh Kominda merupakan faktor yang sangat penting dalam menghimpun informasi dalam melakukan deteksi dini aksi terorisme. Koordinasi yang dilakukan oleh Kominda berfungsi untuk memelihara hubungan baik dalam berbagai kegiatan. Sebagai institusi lintas sektoral, fungsi koordinasi merupakan hal sangat penting dilaksanakan oleh Kominda. Menurut Tripathi dan Raddy, ada 9 syarat untuk mencapai koordinasi yang efektif yakni; hubungan langsung, kesempatan awal, kontinuitas, dinamisme, tujuan yang jelas, organisasi yang sederhana, perumusan wewenang dan tanggung jawab yang jelas, komunikasi yang efektif, kepemimpinan dan supervisi yang efektif¹⁴.

Koordinasi dapat dilaksanakan setiap saat oleh Kominda yang tentunya dihadiri Polres, Kodim, Den Intel Kodam, dan BIN, juga Kesbangpol yang sekarang sudah menjadi badan kesbagpol dengan koordinasi dan sinergi skema kegiatan pencarian informasi, khususnya tentang terorisme melalui mendeteksi secara dini setiap ancaman yang ada dapat dilahirkan untuk selanjutnya Kominda memberikan rekomendasi kepada Bupati atau Walikota dan Gubernur mengenai kebijakan yang berkenaan dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman stabilitas nasional di daerah. Permasalahan yang berkembang selalu direkomendasikan kepada Bupati atau Walikota, dan Gubernur, termasuk isu terorisme. Selain menjalankan tugas koordinasi, Kominda juga melaksanakan fungsi dalam kegiatan intelijen, yaitu penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. Hal ini merupakan penjabaran dari tugas Kominda di lapangan dalam menjalankan perannya untuk mengatasi berbagai ancaman, termasuk ancaman terorisme. Kolaborasi yang sinergis melalui komunikasi dan koordinasi komunitas

intelijen dan kepala daerah di dalam institusi Kominda ini merupakan sebuah kekuatan dan solusi yang mampu berperan dalam menjawab berbagai isu strategis, baik yang bersumber dari pusat maupun daerah yang terkait dengan permasalahan Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan dalam kerangka penguatan Kominda di era otonomi daerah dalam menciptakan kondusifitas kemandirian nasional¹⁵.

KESIMPULAN

Kapasitas merupakan sebuah gambaran yang secara substansial menggambarkan kualitas dan kemampuan dalam penyelenggaraan tugas aparat kewilayahan yang terdiri dari pemerintah daerah, unsur TNI dan Polri dalam konteks ini dalam melaksanakan deteksi dini aksi teroris. Peran dan fungsi Intelijen sebagai mata dan telinga semakin dibutuhkan dalam memberikan informasi yang cepat, tepat dan akurat sebagai bahan untuk mengambil keputusan dalam menentukan kebijaksanaan terhadap berbagai masalah yang dihadapi termasuk dalam mencermati perkembangan aksi terror di Indonesia, pengembangan kapasitas aparat kewilayahan yang terkait dengan fungsi intelijen sangat diperlukan.

Sinergi merupakan kebersamaan dalam berpikir dan bertindak untuk mencapai tujuan bersama dengan hasil yang diperoleh merupakan hasil bersama, dan lebih efektif, efisien serta optimal dibandingkan melaksanakan secara parsial karena itu pertukaran Informasi antar instansi intelijen adalah hal yang positif termasuk dalam mewujudkan kapasitas dan sinergi aparat kewilayahan khususnya di daerah (Pemda, Unsur TNI, Polri) dalam melakukan deteksi dan peringatan dini. Kominda bisa melakukan deteksi dini agar mengetahui segala apa yang ada dan apa yang terjadi di setiap jengkal

¹³ Disarikan Dari Triatmo Hamardiyono Dalam Artikel Implementasi Kebijakan Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Dalam Deteksi Dan Peringatan Dini (Studi Kerusuhan Massa Di Kabupaten Temanggung) pada <http://pps.unla.ac.id/download/pdf> di download pada tanggal 5 mei 2021 pukul 10.32

¹⁴ Moekijat, 1994, Koordinasi; Suatu Tujuan Teoritis, Mandar Maju, Bandung

¹⁵ Disarikan dari Armaidly Armawi dalam artikel kajian penguatan Kominda pada [40744-ID-kajian-penguatan-komunitas-intelijen-daerah.pdf](https://doi.org/10.24090/kajian-penguatan-komunitas-intelijen-daerah.pdf) (neliti.com)

wilayah yang menjadi tanggung jawabnya berikut segala perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat serta perkembangannya termasuk dalam mencermatu perkembangan aksi terror di daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Abimanyu. *Teror Bom di Indonesia*, Jakarta:Grafindo.2005.
- Covey, Steven R, 2010, *The 7 Habits of Highly Effective People (7 Kebiasaan manusia yang sangat efektif)*
- Jajang Jahroni dan Jamhari Makruf. *Memahami Terorisme, Sejarah, Konsep dan Model*, Jakarta:Kencana Prenadamedia Grup.2016.
- Y Wahyu Suranto, Jasir Karwita, Victor Hasibuan, *Intelijen teori, aplikasi, dan modernisasi*, Ed.6, Multindo Mega Pratama, Jakarta. 2008
- Naskah Sekolah Sementara Pengenalan Intelijen, Kep Danpusintelad No Kep/5/I/2015 Tgl 28 Januari 2015
- D Suryadi. "Kedudukan Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten/Kota Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Komunitas Intelijen Daerah Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara. 2016.
- Jenderal TNI Endriartono Sutarto. *Badan Intelijen Harus dikontrol*, Harian Umum Kompas, Nomor 335 Tahun ke-40, Tanggal 11 Juni, Jakarta, 2005
- (2017). Penanggulangan Terorisme Berdasarkan Konsep Problem-Solving Approach (Kajian Pada Respons Pemerintah Terhadap Gerakan Jamaah Ansharut Tauhid), *Jurnal Prodi Damai dan Resolusi Konflik*. Volume 3(2).
- Academia.edu. H. R. Riyadi Soeprapto dalam artikel "Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah Menuju Good Governance" disampaikan pada Workshop Reformasi Birokrasi di Kendari pada (PDF) *The Capacity Building For Local Government Toward Good Governance* | Putri Diana Winata - [Academia.edu](https://www.academia.edu/27736869/The-Capacity-Building-For-Local-Government-Toward-Good-Governance). Diakses pada 30 Juni 2006. <https://www.academia.edu/27736869/The-Capacity-Building-For-Local-Government-Toward-Good-Governance>.
- Jurnal Keamanan Nasional, 2017. Suryani Terorisme dan Deradikalisasi: Pengantar Memahami Fundamenta lisme Islam dan Strategi Pencegahan Aksi Terorisme Jurnal Keamanan Nasional (ubharajaya.ac.id)
- Surat Keputusan Kapolri Nomor: Skep/991/XII/2005 tanggal 30 Desember 2005, tentang Sistem Pembinaan Alat Khusus Intelijen pada journal.id/LitbangPOLRI/article/download/pdf
- Triatmo Hamardiyono. Implementasi Kebijakan Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Dalam Deteksi Dan Peringatan Dini (Studi Kerusuhan Massa Di Kabupaten Temanggung). PPS Unla. [http://pps.unla.ac.id > download/pdf](http://pps.unla.ac.id/download/pdf)